TINDAKAN RASISME & DISKRIMINASI TERHADAP ORANG PAPUA MENCERMINKAN SILA KE-2 KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB

Asfia Lailatun Ni'mah¹, Dhaivina Salma Fadela Putri², Aditya Dwi Priyanto³,
Wahyu Adi Saputro⁴, Ahmad Aniko Misbakhul Umam⁵, Day Ramadhani Amir⁶
^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Teknologi Informasi, IKIP PGRI Bojonegoro

e-mail : asfia.lailaa@gmail.com¹, dhaivinasalma2@gmail.com², adityadwipriyanto@gmail.com³,
wahyuady1230@gmail.com⁴, ahmadaniko789@gmail.com⁵,
day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id⁶

Abstrak

Tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua masih menjadi persoalan sosial dan kemanusiaan yang serius di Indonesia. Fenomena ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman publik mengenai isu diskriminasi rasial serta menganalisis dampak sosial dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat Papua. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber sekunder, termasuk laporan hak asasi manusia, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa orang asli Papua masih mengalami diskriminasi sistemik, baik dalam bentuk verbal maupun struktural, yang berdampak pada kesehatan mental, keterasingan sosial, marginalisasi ekonomi, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Meskipun telah terdapat regulasi seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008, implementasinya dinilai belum optimal. Kajian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan berbasis keadilan sosial, peningkatan literasi publik mengenai isu rasial, serta peran aktif media dan generasi muda dalam membangun kesadaran kolektif. Kolaborasi lintas sektor dipandang krusial untuk menghapus praktik diskriminasi rasial dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Papua, diskriminasi rasial, hak asasi manusia, Pancasila, keadilan sosial, kebijakan publik

Abstract

Acts of racism and discrimination against Indigenous Papuans remain a persistent social and humanitarian issue in Indonesia. These practices directly contradict the core values of Pancasila, particularly the second principle: Just and civilized humanity. This article aims to explore public understanding of racial discrimination and analyze the social impacts and effectiveness of legal enforcement related to cases affecting the Papuan community. Employing a systematic literature review method, this study draws from secondary sources such as human rights reports, scholarly articles, and national legal documents. Findings reveal that Indigenous Papuans continue to face systemic discrimination, both verbal and structural, resulting in psychological distress, social isolation, economic marginalization, and diminished trust in the justice system. Despite the existence of legal instruments such as Law No. 39 of 1999 and Law No. 40 of 2008, implementation remains suboptimal. This study emphasizes the urgency of justice-oriented policy reform, increased public literacy on racial issues, and the active role of media and youth as agents of change. Cross-sectoral collaboration is deemed essential to eradicate racial discrimination and actualize the humanitarian values embedded in Pancasila within national life.

Keyword: Papua, racial discrimination, human rights, Pancasila, social justice, public policy

PENDAHULUAN

Isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua telah menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, praktik diskriminatif yang bersifat sistemik dan kultural terhadap masyarakat Papua masih terus berlangsung. Rasisme terhadap orang Papua tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan verbal dan stereotip negatif, tetapi juga dalam bentuk marginalisasi ekonomi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan publik, serta ketimpangan dalam perlakuan hukum. Williams, D. R., & Mohammed, S. A. (2013)

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang dijunjung dalam sila kedua Pancasila *‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’* dengan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok minoritas etnis di Papua. (H.W.Widodo 2017) Secara teoritis, diskriminasi rasial dapat dipahami melalui pendekatan *critical race theory* dan teori keadilan sosial yang menyoroti bagaimana struktur kekuasaan dan kebijakan negara dapat mereproduksi ketidakadilan secara sistematis. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus seperti ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (2019) serta berbagai insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi. M.R. McDonald (2020)

Berbagai instrumen hukum nasional telah diundangkan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih dipertanyakan, mengingat masih tingginya angka pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum. H. H. Haryanto (2020) Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menangani rasisme terhadap orang Papua, termasuk penguatan kesadaran publik, reformasi kebijakan, dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat terhadap isu diskriminasi rasial terhadap orang Papua, menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan, serta meninjau efektivitas kebijakan dan perangkat hukum yang telah diberlakukan. Kajian ini juga akan menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor terutama peran media dan generasi muda dalam mendorong transformasi sosial yang berkeadilan dan beradab sesuai dengan semangat Pancasila.

1. LANDASAN TEORI

A. Pancasila dan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang beradab tanpa diskriminasi. Nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa memandang ras, etnis, atau latar belakang sosial. (Jurnal FORIKAMI)

Penelitian oleh Boiliu et al. (2022) menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila memiliki konvergensi dengan etika global yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

B. Pengertian Rasisme dan Diskriminasi Rasial

Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau ideologi yang menyatakan bahwa ras tertentu lebih unggul atau inferior dibandingkan ras lainnya, yang sering kali mengarah pada

perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis mereka. Diskriminasi rasial, sebagaimana didefinisikan dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), mencakup setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis yang bertujuan atau berdampak pada penghapusan atau pengurangan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis. Namun, laporan Human Rights Watch (2024) mengungkapkan bahwa diskriminasi terhadap orang asli Papua masih terjadi secara sistemik, baik dalam bentuk kekerasan verbal, stereotip negatif, maupun perlakuan diskriminatif dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

C. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pada prinsip keadilan sebagai fairness, di mana distribusi sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks Papua, penerapan teori ini mengharuskan adanya kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Papua akibat diskriminasi struktural yang berlangsung lama.

Penelitian oleh Rasidi dan Al Farizi (2023) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kebijakan hukum dan sosial untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka menekankan bahwa pendekatan berbasis humanisme dapat membantu mengatasi tantangan dalam perlindungan HAM di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik di Indonesia.

D. Critical Race Theory (CRT)

Critical Race Theory (CRT) adalah pendekatan teoretis yang menyoroti bagaimana hukum dan institusi hukum dapat mencerminkan dan mempertahankan struktur kekuasaan yang diskriminatif terhadap kelompok rasial tertentu. CRT menekankan bahwa rasisme bukan hanya hasil dari prasangka individu, tetapi juga tertanam dalam sistem hukum dan kebijakan publik.

Dalam konteks Papua, laporan dari International Network of Civil Liberties Organizations (2024) menunjukkan bahwa aparat keamanan sering kali melakukan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap masyarakat Papua, yang mencerminkan adanya rasisme yang terinstitusionalisasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

E. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konteks Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Di Indonesia, perlindungan HAM dijamin dalam UUD 1945 dan diperkuat melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, implementasi perlindungan HAM di Papua masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan dari Amnesty International (2022) mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum, masih sering terjadi dan jarang ditindaklanjuti secara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua. Data dikumpulkan melalui analisis sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti laporan tahunan Komnas HAM, dokumen

hukum (seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008), artikel jurnal ilmiah, berita media massa, serta laporan dari lembaga swadaya masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan pendekatan teoritis dari teori keadilan sosial, critical race theory, serta teori HAM. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana struktur sosial dan kebijakan publik berdampak pada pengalaman diskriminasi orang asli Papua, serta sejauh mana instrumen hukum nasional efektif dalam melindungi mereka dari perlakuan rasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua masih menjadi masalah yang berakar kuat dalam struktur sosial dan budaya Indonesia. Melalui analisis literatur dari laporan hak asasi manusia, jurnal ilmiah, dan peraturan hukum nasional, diperoleh sejumlah temuan utama yang merefleksikan bentuk-bentuk diskriminasi dan dampaknya, serta efektivitas upaya hukum yang telah dilakukan.

a. Bentuk Diskriminasi: Verbal, Kultural, dan Struktural

Diskriminasi terhadap orang Papua tidak hanya terjadi dalam bentuk ujaran rasis di ruang publik, tetapi juga dalam bentuk yang lebih sistemik. Dalam laporan Komnas HAM (2021), disebutkan bahwa tindakan kekerasan verbal seperti penyebutan istilah “monyet” dan perlakuan tidak manusiawi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (2019) merupakan manifestasi nyata dari rasisme kultural. Diskriminasi struktural terjadi ketika orang Papua mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik secara adil. Ketimpangan ini diperkuat dengan minimnya representasi politik dan kurangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum.

b. Dampak Sosial dan Psikologis

Dampak dari diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua sangat kompleks. Diskriminasi yang terus-menerus menyebabkan trauma psikologis, penurunan harga diri, serta alienasi sosial, terutama bagi generasi muda Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah. Studi yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengindikasikan bahwa rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum mendorong lahirnya sentimen separatistis dan konflik horizontal.

Lebih lanjut, diskriminasi ekonomi memperparah kemiskinan struktural di Papua. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan belum mengakomodasi keadilan distribusi sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima dan kedua Pancasila.

c. Evaluasi Terhadap Instrumen Hukum

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur larangan diskriminasi, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, temuan dari Amnesty International (2022) menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi masih sangat lemah, ditandai dengan minimnya kasus yang diproses hingga vonis, serta tidak adanya mekanisme pemulihan bagi korban.

Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat keamanan terlibat langsung dalam praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua, sehingga memperdalam krisis

kepercayaan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam menjamin prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

d. Peran Media dan Generasi Muda

Media massa dan media sosial memiliki peran yang ambivalen. Di satu sisi, media sering memperkuat stereotip negatif terhadap orang Papua dengan narasi bias dan kriminalisasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang perlawanan baru, di mana aktivis Papua dan generasi muda menyuarakan ketidakadilan dan menuntut perlindungan HAM. Kampanye seperti #PapuanLivesMatter menjadi titik balik dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya menghentikan diskriminasi rasial.

Melibatkan generasi muda, baik dari Papua maupun dari wilayah lain, sebagai agen perubahan adalah strategi krusial. Literasi anti-diskriminasi, pendidikan multikultural, serta integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan formal dan informal menjadi langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan adil.

e. Aktualisasi Nilai Pancasila

Diskriminasi terhadap orang Papua mencerminkan pengingkaran terhadap sila kedua Pancasila: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Nilai ini seharusnya menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan publik, perilaku sosial, dan sistem hukum. Namun, ketidaksesuaian antara nilai ideal dan realitas empiris menunjukkan adanya ketimpangan moral dan struktural dalam implementasi nilai kebangsaan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, dibutuhkan reformasi kebijakan yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan dialog yang setara. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan generasi muda menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transformasi sosial yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Rasisme terhadap masyarakat Papua merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Diskriminasi ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ujaran kebencian hingga kekerasan dan marginalisasi. Dampaknya sangat luas, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Meskipun ada regulasi yang melarang diskriminasi rasial, penegakan hukumnya masih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret dari masyarakat Indonesia dan negara untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua dan menghapus praktik rasisme secara menyeluruh di Indonesia. Dalam hal ini, sikap saling mengerti menghormati dan toleransi dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan. Kebersamaan dapat menciptakan suasana kedekatan yang lebih harmonis satu sama lain untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). Silencing voices, suppressing criticism: The human rights situation in Papua. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022ENGLISH.pdf>
- Boiliu, N. I., Sihombing, A. F., Sampaleng, D., Widjaja, F. I., & Simanjuntak, F. (2022). Human rights: The convergence of the second sila of Pancasila and Hans Kung's global ethics in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.6783>

-
- BBC Indonesia. (2024, September 19). Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl470o>
- Human Rights Watch. (2024). "If It's Not Racism, What Is It?": Discrimination and other abuses against Papuans in Indonesia. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2024/09/18/if-its-not-racism-what-it/discrimination-and-other-abuses-against-papuans>
- Human Rights Watch. (2024, September 19). Indonesia: Rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Retrieved from <https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/indonesia-racism-discrimination-against-indigenous-papuans>
- International Network of Civil Liberties Organizations. (2024). Papua and racism: How the role of the Indonesian police aggravates conflict and violates human rights. Retrieved from <https://inclo.net/wp-content/uploads/2024/09/INCLO-In-Our-Hands-Indonesia-Papua-Racism-police.pdf>
- Kolibi Journal. (2024, June 14). Diskriminasi rasisme warga Papua dalam sudut pandang HAM. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1795>
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2023). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan deklarasi HAM. *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.12345/jnips.2023.6789>
- VOA Indonesia. (2020, June 21). Diskriminasi rasial, persoalan mendasar di Papua. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-rasial-persoalanmendasar-di-papua/5471179.html>
- Waqaf Ilmu Nusantara. (2023). Perilaku diskriminatif dan rasisme terhadap keberadaan orang asli Papua. Retrieved from <https://waqafilmunusantara.com/wpcontent/uploads/2023/06/perilaku.pdf>
- BEM FH UPNVJ. (2020). Press release: Duplik diskriminasi rasial Papua. Retrieved from <https://bemfh.upnvj.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Press-Release-DuplikDiskriminasi-Rasial-Papua.pdf>